

BAB I

PENDAHULUAN

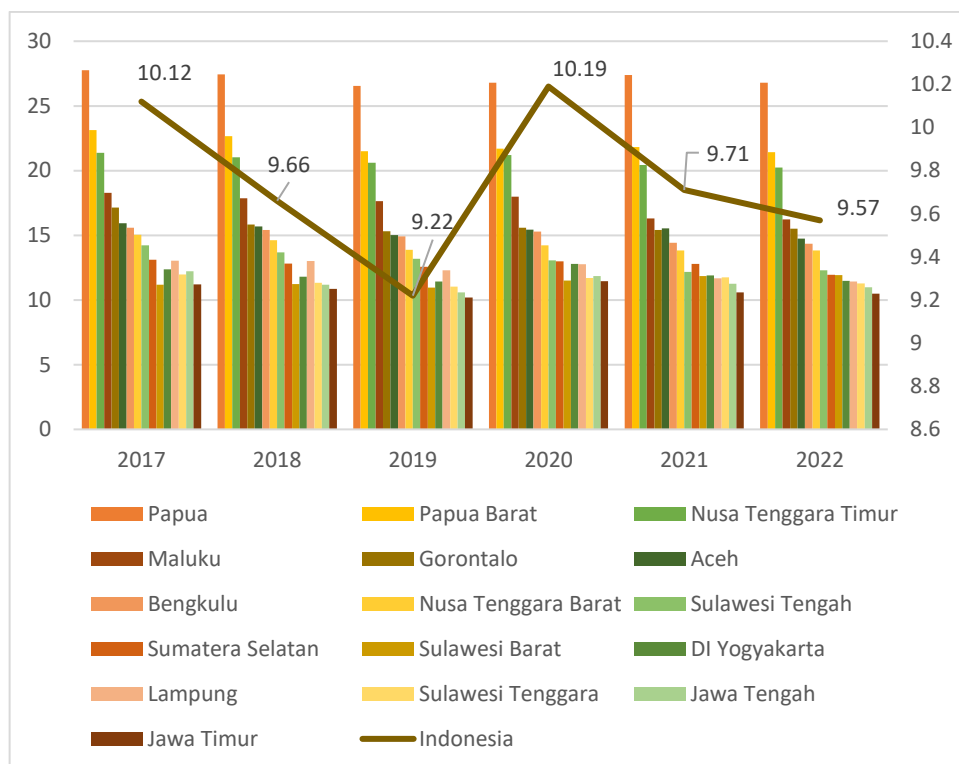
I.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu agenda yang perlu untuk dilakukan oleh setiap negara guna mewujudkan kesejahteraan hidup rakyatnya (Frisdiantara & Muhklis, 2018). Namun, proses pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut tidaklah mudah, karena negara akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dimana salah satunya adalah kemiskinan (Basmar et al., 2021).

Kemiskinan telah menjadi isu strategis dalam pembangunan karena kemiskinan dapat menjadi awal dari munculnya berbagai masalah sosial lain seperti pengangguran, tindak kriminal, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya generasi penerus (Itang, 2015). Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan perlu untuk diatasi secara maksimal sebab dampak yang ditimbulkan dapat melebar dan kurang positif pada banyak aspek kehidupan masyarakat (Trisnu & Sudiana, 2019).

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia harusnya berpotensi untuk menjadi negara dengan penduduk yang sejahtera. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per September 2022, masih terdapat 26,36 juta penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Musrifah (2022), kemiskinan di Indonesia memang masih menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi bahkan di setiap daerah nya. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar 1 yakni data persentase penduduk miskin per Provinsi yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data pada gambar 1 tersebut, selama 6 tahun yakni mulai dari tahun 2017 – 2022 masih terdapat 16 Provinsi di Indonesia yang memiliki persentase penduduk miskin diatas 10%, lebih tinggi dibandingkan ke 18 Provinsi lainnya yang persentase kemiskinannya sudah dibawah 10%. Adapun 16 Provinsi tersebut diantaranya yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.



Gambar 1 Provinsi-Provinsi di Indonesia dengan Persentase Penduduk Miskin > 10% Pada Tahun 2017 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Kemiskinan terjadi tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Mohammad Kurniawan (2017), faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja, inflasi, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih, transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, dan pendidikan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Selain itu menurut Kuncoro, ketimpangan dalam kepemilikan sumberdaya, ketimpangan distribusi pendapatan serta kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan melalui IPM juga dapat berpengaruh terhadap kemiskinan (Vania Grace Sianturi et al., 2021).

Kaitanya pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan disebabkan karena tujuan dari pertumbuhan ekonomi sendiri adalah untuk membangun kesejahteraan rakyat (Hatta & Khoirudin, 2020). Dalam Teori *Trickle Down Effect* dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dengan sendirinya berdampak pada masyarakat

kalangan bawah melalui terciptanya lapangan kerja (Soleh, 2015). Terciptanya lapangan kerja diharapkan dapat menyerap banyak pengangguran yang ada, sehingga dengan berkurangnya pengangguran dan semakin banyaknya masyarakat yang bekerja akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Adapun untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah seseorang dapat melihat nilai PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat regional atau daerah dapat menggunakan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang tentunya dapat diakses melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (Rumerung & Sangur, 2022).

Akan tetapi terdapat perdebatan akademik mengenai pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Seperti pada penelitian Estrada & Wenagama (2020) yang menguji pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan mendapati hasil yakni laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian Zuhdiyaty & Kaluge (2017) pertumbuhan ekonomi dinyatakan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut disebabkan manusia merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian. Dimana maju nya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran manusia sebagai pengelolanya (Wulandari et al., 2022). Maka, dengan maju nya pertumbuhan ekonomi akibat baiknya pembangunan manusia yang dilakukan oleh suatu negara, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai menggunakan tiga indikator yakni pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak (Hutasuhut et al., 2021). Margareni et al., (2016) berpendapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka produktivitas orang tersebut akan meningkat begitu pun dengan penghasilannya. Penghasilan yang meningkat tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi seseorang untuk bisa lepas dari perangkap lingkaran kemiskinan (Margareni et al., 2016). Kemudian menurut Indrawati et al., (2019) kesehatan juga merupakan syarat penting dalam meningkatkan produktivitas. Jika kondisi seseorang sehat, maka orang tersebut dapat lebih produktif atau atau dapat lebih

banyak melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan taraf hidupnya seperti bersekolah maupun bekerja.

Namun, dalam beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh IPM terhadap kemiskinan, ditemukan hasil yang berbeda-beda. Sehingga memantik adanya perdebatan akademik mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Megawati & Sebayang (2018) didapati hasil bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2011 – 2014. Namun pada penelitian Bariyyatin (2021) ditemukan hasil bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan penduduk Indonesia tahun 2016 – 2019 tidaklah signifikan.

Selanjutnya ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti pendapat Mohammad Kurniawan (2017), ketimpangan distribusi pendapatan dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Menurut Barber (2008) hubungan keduanya merupakan hubungan yang pragmatis, yakni ketimpangan distribusi pendapatan dapat menyebabkan kemiskinan menjadi semakin parah.

Hingga saat ini masih terdapat perdebatan yang menarik antara ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yakni terkait mana yang harus didahulukan, pertumbuhan ekonomi yang pesat atau pembangunan yang merata (Maulidiyah et al., 2022). Ketika pembangunan berorientasi pada pemerataan, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat, namun kemiskinan dapat teratasi secara perlahan. Sedangkan, ketika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan yang pesat, maka kesenjangan akan muncul dan tentunya diikuti dengan masalah kemiskinan yang semakin parah.

Selain perdebatan diatas, dalam penelitian terdahulu pun banyak yang masih memperdebatkan pengaruh dari ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan. Misalnya saja pada penelitian Indrawati et al., (2019) yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan tidaklah signifikan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sari & Sa'roni (2020) ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan berpengaruh signifikan.

Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan juga ketimpangan distribusi pendapatan, zakat sebagai ibadah yang wajib dijalankan oleh umat muslim pun dapat ikut andil dalam mempengaruhi angka kemiskinan di

Indonesia. Hal tersebut disebabkan, Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim nya yang berjumlah 229 juta jiwa, memiliki potensi zakat yang amat besar yakni mencapai angka Rp 26 triliun pada tahun 2022 (BAZNAS, 2022). Besarnya potensi zakat tersebut erat kaitannya dengan asumsi pengentasan kemiskinan. Sebab secara logika, banyak orang akan berpikir peluang untuk mengentaskan kemiskinan tentunya akan semakin terbuka lebar bahwa dengan besarnya potensi zakat tersebut (Rohim et al., 2019).

Optimalisasi pengelolaan zakat secara produktif menjadikan zakat sebagai salah satu solusi efektif bagi pengentasan kemiskinan (Elvira, 2022). Seperti yang dikatakan dalam penelitian Alam et al., (2019) dana Zakat, Infak, dan Sedekah tidak akan optimal manfaatnya jika tidak dikelola dengan baik dan sistematis. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pengelolaan zakat secara nasional dapat berdampak pada keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan (Elvira, 2022).

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 diserahkan kepada Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Baznas sendiri merupakan lembaga negara nonstruktural yang bersifat independen dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri (Elvira, 2022). Diharapkan Baznas selaku lembaga pengelola zakat dapat memberikan kinerja yang baik sehingga zakat dapat menjadi alat untuk menurunkan atau mengentaskan kemiskinan.

Kinerja pengelolaan zakat di Indonesia dapat diukur menggunakan Indeks Zakat Nasional (Elvira, 2022). Indeks Zakat Nasional merupakan alat untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat yang dibuat oleh BAZNAS pada tahun 2016 (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirotin et al., (2017) mengenai pengaruh zakat dalam tinjauan IZN terhadap kemiskinan ditemukan hasil bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian dalam penelitian Elvira (2022) mengenai dampak kinerja pengelolaan zakat terhadap kemiskinan ditemukan hasil jika Indeks Zakat Nasional BAZNAS RI dalam keadaan baik maka dapat berdampak positif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan (Elvira, 2022). Selanjutnya pada penelitian Widyaningsih et al., (2016) pun dinyatakan

bahwa Zakat, Infaq, Sedekah dapat memberikan pengaruh baik terhadap ekonomi dan sosial masyarakat jika baik dalam pengelolaannya (Widyaningsih et al., 2016).

Akan tetapi hasil pada ketiga penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela & Aswad (2018) serta Wahyuningsih (2020) yang mana menyatakan bahwa zakat berpengaruh tidak signifikan pada kemiskinan. Alasan di baliknya pun beragam, zakat dianggap belum bisa berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan karena dana yang dihimpun masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada, kemudian alasan lain adalah karena pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga zakat masih belum cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan kemiskinan yang terjadi serta adanya *gap* pada penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Peneliti mencoba untuk menguji kembali apakah faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kinerja pengelolaan zakat dapat mempengaruhi kemiskinan penduduk di Indonesia khususnya di enam belas provinsi yang persentase kemiskinan penduduknya lebih dari sepuluh persen.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan referensi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pengelola zakat dalam membuat suatu kebijakan yang dapat menekan angka kemiskinan yang ada.

Adapun kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini ada pada indikator yang digunakan pada salah satu variabel penelitian, yakni variabel kinerja pengelolaan zakat yang menggunakan indikator Indeks Zakat Nasional. Dimana berbeda dengan kebanyakan penelitian terdahulu yang menggunakan indikator seperti dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat atau dana zakat yang berhasil disalurkan.

I.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang tersusun berdasarkan latar belakang dalam penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Kinerja Pengelolaan Zakat terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Kinerja Pengelolaan Zakat secara bersama-sama terhadap Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai beberapa tujuan berikut:

1. Menjelaskan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia
2. Menjelaskan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia.
3. Menjelaskan pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia.
4. Menjelaskan pengaruh Kinerja Pengelolaan Zakat terhadap kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia.
5. Menjelaskan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Kinerja Pengelolaan Zakat secara bersama-sama terhadap Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak baik itu civitas akademika maupun para pemangku kebijakan. Adapun manfaat tersebut diantaranya:

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan topik serupa. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian para pembaca terhadap permasalahan kemiskinan yang ada saat ini khususnya di kawasan timur Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam mengupayakan perbaikan-perbaikan khususnya pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan itu sendiri, sehingga permasalahan kemiskinan dapat teratasi.

I.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengenai upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengentaskan kemiskinan di masa yang akan datang.

b. Bagi Lembaga Zakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi yang mampu membantu lembaga zakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya baik itu pengimpunan, pengelolaan, penyaluran, maupun pelaporan. Sehingga kedepannya lembaga zakat dapat berperan secara konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi-Provinsi yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi.